



# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT  
BINA PENGELOLAAN  
EKOSISTEM ESENSIAL

**2020**



**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL**  
**TAHUN 2020**



JAKARTA, JANUARI 2021

# RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

## RINGKASAN/ IKHTISAR

### CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BPPE TH 2020



01

**LUAS KAWASAN YANG  
DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI  
DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF  
DI LUAR KAWASAN KONSERVASI**

**Seluas 6.663 Juta Ha (83,29 %)**

#### PERMASALAHAN



Keterlambatan dimulainya kegiatan akibat pandemi covid-19



Target yang luas tanpa dibarengi dengan anggaran yang memadai



Refocusing anggaran tanpa dibarengi dengan revisi target

#### UPAYA TINDAK LANJUT



mengoptimalkan kegiatan lain dalam memperoleh data



Meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan PEMDA dan stakeholder lainnya



Mengoptimalkan sosialisasi dan bimtek mengenai kegiatan inver



02

**JUMLAH KAWASAN EKOSISTEM  
ESENSIAL YANG DITINGKATKAN  
EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA**

**11 Unit KEE (100 %)**



Realisasi anggaran sebesar  
4.427.375.027 (93,04%)



Capaian kinerja  
sebesar 91,65%

maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPPE tahun 2020 berjalan EFISIEN



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL



Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai Direktorat BPEE) pada tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat BPEE Tahun 2020-2024. Direktorat BPEE memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai KEE), meliputi perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta fasilitasi pembentukan kelembagaan di daerah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa laporan ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dan diharapkan telah memenuhi tujuannya dalam upaya perlindungan KEE. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat struktural, staf lingkup Direktorat BPEE dan para pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penting yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat BPEE.

Jakarta, 15 Januari 2021

Direktur,



**Ir. Asep Sugiharta, M.Sc**

NIP. 19640229 199003 1 001



# DAFTAR ISI

|                                                   | Halaman |
|---------------------------------------------------|---------|
| RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA .....          | i       |
| KATA PENGANTAR .....                              | ii      |
| DAFTAR ISI .....                                  | iii     |
| DAFTAR TABEL .....                                | iv      |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | v       |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                      | 1       |
| A. Latar Belakang .....                           | 1       |
| B. Kelembagaan .....                              | 2       |
| C. Sumberdaya & Sarana Pendukung .....            | 3       |
| D. Isu Strategis 2020 .....                       | 4       |
| BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....             | 6       |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....        | 6       |
| B. Rencana Target Jangka Menengah 2020-2024 ..... | 6       |
| C. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 .....       | 7       |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....            | 9       |
| BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA 2020 .....      | 10      |
| A. Capaian Kinerja (IKK) .....                    | 10      |
| B. Realisasi Anggaran .....                       | 38      |
| BAB IV     PENUTUP .....                          | 40      |
| DAFTAR LAMPIRAN                                   |         |



# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                 | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024 .....                                                                  | 7       |
| Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2020 .....                                                                   | 8       |
| Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE<br>per Output .....                                      | 8       |
| Tabel 4. Lokasi Target IKK Direktorat BPEE TA 2020 .....                                                                        | 8       |
| Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2020 .....                                                                    | 10      |
| Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun<br>2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ..... | 11      |
| Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 .....                                                                             | 13      |
| Tabel 8. Tabel realisasi kelembagaan KEE .....                                                                                  | 14      |
| Tabel 9. Tabel Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Per UPT ....                                                  | 14      |
| Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 .....                                                                            | 21      |
| Tabel 11. Data Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE di 11 Lokasi .....                                                       | 35      |
| Tabel 12. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas<br>Pengelolaannya .....                               | 38      |
| Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan<br>Tahun 2020 .....                                  | 39      |



# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                                                                                   | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja .....                                                                                                                                                                                                          | i       |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....                           | 3       |
| Gambar 3. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKK 1 .....                                                                                                                                                                            | 14      |
| Gambar 4. Penyusunan NSPK Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar KSA, KPA dan TB .....                                                                                                                           | 16      |
| Gambar 5. Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi Region Sumatera, Region Jawa, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Bali-Nusra, dan Region Maluku-Papua .....                                                  | 17      |
| Gambar 6. Koordinasi Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi .....                                                                                                                                                        | 18      |
| Gambar 7. Kegiatan Verifikasi hasil inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi .....                                                                                                                                                        | 19      |
| Gambar 8. Rapat Penyusunan NSPK Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE di Hotel Salak Bogor .....                                                                                                                                  | 22      |
| Gambar 9. Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Kehati di Bandung Giri Gahana Resort .....                                                                                                                                               | 23      |
| Gambar 10. Kunjungan Lapang ke Lokasi Taman Kehati Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat .....                                                                                                                                                       | 24      |
| Gambar 11. Bimbingan Teknis Interpreter (Pemandu Wisata) Taman Kehati Hutan Pelawan Kab. Bangka Tengah dan Praktek Kepemanduan Wisata oleh Peserta yang Dipandu oleh Narasumber di Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan, Bangka Tengah ..... | 24      |
| Gambar 12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat di KEE Mangrove Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur .....                                                                                                                  | 24      |
| Gambar 13. Salah Satu Bentuk Kegiatan Koordinasi dalam rangka Pembahasan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Teluk Pangpang di Hotel Aston, Surabaya .....                                                                                               | 25      |
| Gambar 14. Kegiatan Monitoring Taman Kehati Kebon Pelok, Cirebon .....                                                                                                                                                                            | 26      |
| Gambar 15. Koordinasi Pengusulan Kota Surabaya sebagai Nominasi <i>Wetland City Accreditation</i> .....                                                                                                                                           | 26      |
| Gambar 16. Kegiatan koordinasi terkait Konvensi Ramsar di Situs Ramsar Suaka Margasatwa Pulau Rambut .....                                                                                                                                        | 27      |
| Gambar 17. Koordinasi terkait International <i>Coral Reef Initiative</i> di Pulau Kelapa, TN Kepulauan Seribu .....                                                                                                                               | 27      |
| Gambar 18. Penangkaran Penyu Sisik ( <i>Eretmochelys imbricata</i> ) di Pulau Kelapa,                                                                                                                                                             |         |



|            |                                                                                                                                                                                 |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | TN Kepulauan Seribu .....                                                                                                                                                       | 28 |
| Gambar 19. | Pelatihan Penyusunan Dokumen Situs Ramsar Baru di The Patra Bali Resort & Villas, Denpasar, Bali .....                                                                          | 29 |
| Gambar 20. | Kunjungan Lapang ke Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai dan Lagoon ITDC, Denpasar, Bali .....                                                                                    | 30 |
| Gambar 21. | Rapat Penyusunan NSPK secara daring dan tatap muka di Salak The Heritage Hotel, Bogor .....                                                                                     | 31 |
| Gambar 22. | Bimtek Peningkatan Efektivitas secara daring dan tatap muka di Bandung, Jawa Barat tanggal 22-24 Juli 2020 .....                                                                | 31 |
| Gambar 23. | Bimtek Peningkatan Efektivitas secara daring dan tatap muka di Salak Pajajaran Hotel, Bogor .....                                                                               | 32 |
| Gambar 24. | Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas di Lombok pada tanggal 10 September 2020 dengan peserta dari UPT BBKSDA/BKSDA region Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ..... | 33 |
| Gambar 25. | Rencana Aksi Pelindunganat Koordinasi lingkup BBKSDA/BKSDA region Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Oktober 2020 .....                          | 33 |
| Gambar 26. | Kegiatan monitoring dan evaluasi di Kalimantan Tengah .....                                                                                                                     | 34 |
| Gambar 27. | Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2 .....                                                                                                                              | 38 |



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati atau kehati meliputi seluruh organisme yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, hewan dan mikroba. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk eksistensi manusia di dalamnya (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2016). Keanekaragaman hayati beserta dengan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat selalu terpelihara kelestariannya dan mampu mewujudkan keseimbangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, telah disusun skema perlindungan keanekaragaman hayati yang dikategorikan menjadi Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru.

Berdasarkan data *Gap Analysis* oleh Kementerian Kehutanan dan berbagai lembaga pada tahun 2010 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat lebih dari 105 juta hektar yang dikategorikan sebagai **ekosistem penting** dan **penyangga/penghubung** yang berada di luar kawasan konservasi. Ekosistem penting tersebut merupakan ekosistem alami dan/atau buatan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan fungsi koridor hidupan liar serta zona penyangga. Di luar kawasan konservasi terdapat sekitar 80% satwa dilindungi yang bernilai penting (Gap Analisis 2010). Guna melindungi kawasan tersebut pemerintah menetapkan sebagai **Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)**.

Laporan Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2020 yang merupakan laporan hasil pencapaian kinerja Direktorat BPPE selaku pembina pengelolaan KEE di Indonesia selama tahun 2020. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Direktorat BPPE dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPPE tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat



BPEE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

## **B. Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat BPEE adalah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) KSDAE. Direktorat BPEE dipimpin oleh Direktur.

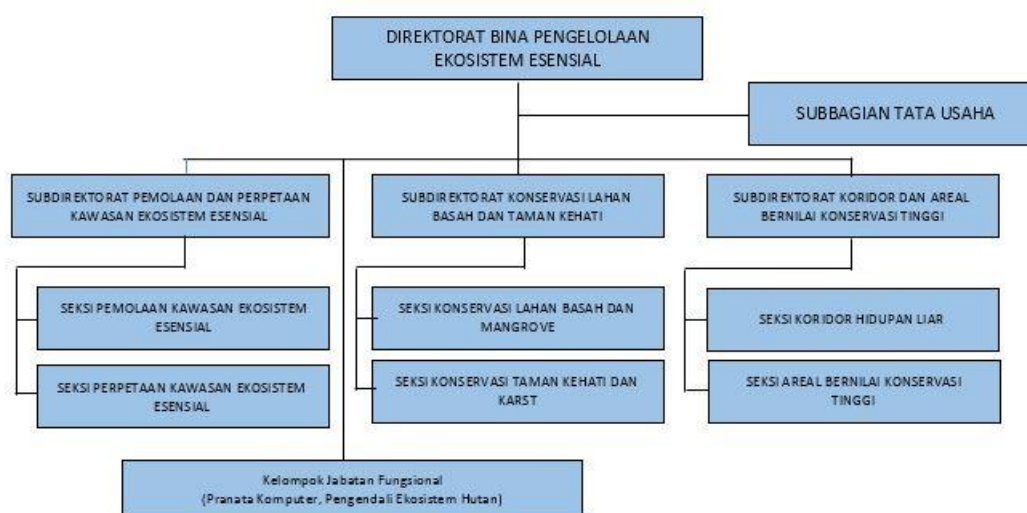
### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat BPEE menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan KEE, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan perpetaan KEE, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemolaan dan perpetaan perpetaan KEE, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan perpetaan KEE, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan perpetaan KEE, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### 3. Struktur Organisasi

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 3 Eselon III, yaitu: 1) Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan KEE; 2) Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman kehati; 3) Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; ditunjang dengan 4) Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat BPEE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal KLHK. Adapun struktur organisasi Direktorat BPEE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### C. Sumberdaya & Sarana Pendukung

#### 1. Sumber Daya Manusia

Direktorat BPEE merupakan Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS aktif sebanyak 28 pegawai, PNS diperbantukan di Instansi lain sebanyak 2 orang, dan PPNPN sebanyak 9 orang sehingga total seluruh ASN berjumlah 39 orang. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan jenis kelamin adalah 20 laki-laki dan 19 perempuan. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan tingkat pendidikan adalah 12 orang S2, 19 orang S1, 5 orang D3, dan 3 orang SMA/ sederajat.

## **2. Sarana Prasarana**

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat BPEE per 31 Desember 2020 dalam rangka pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial mencapai Rp. 1.343.020.682,-. Secara lebih rinci aset Direktorat BPEE tahun 2020 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu persediaan. Nilai aset lancar Direktorat BPEE per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.257.000,-.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.662.756.725,- dan Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp3.551.823.043,- sehingga Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) adalah sebesar Rp1.110.933.682,-.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat BPEE per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp431.334.650,- dan Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp200.504.650,- sehingga Aset Tetap Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) adalah sebesar Rp230.830.000,-.

## **D. Isu Strategis 2020**

Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :

1. Meningkatkan ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KEE untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
3. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam rangka membangun kesepahaman pengelolaan KEE dengan mengadopsi prinsip pokok konservasi.
4. Internalisasi kebijakan KEE dalam perencanaan tata ruang nasional maupun daerah.
5. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya penyesuaian waktu dan metode pelaksanaan kegiatan Direktorat BPEE.

6. Reorganisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak kepada perubahan nomenklatur Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial menjadi Direktorat Bina Pengelolaan dan pemulihan ekosistem, dengan penambahan Sub Direktorat Pemulihan. Hal ini tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, mengingat tidak ada perubahan pada tugas dan fungsi Direktorat BPÉE melainkan penambahan, kedepannya akan memerlukan penyesuaian pada pelaksanaan kegiatan apabila reorganisasi telah ditetapkan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Direktorat BPEE menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024. Direktorat BPEE bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang ekosistem esensial.

### A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat BPEE Tahun 2020 berpedoman pada dokumen perencanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BPEE Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Direktur BPEE Tahun 2020 yang memuat kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati yang berada di luar kawasan konservasi.

Sasaran kegiatan Direktorat BPEE yaitu: (1) Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi, dan (2) Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif. Sasaran tersebut memiliki indikator yaitu: (1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (55 Unit KEE). Kedua target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

### B. Target Jangka Menengah (2020-2024)

Direktorat BPEE menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan **Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial**. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat BPEE. **Sasaran** yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah (1) Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi, dan (2) Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif. Adapun tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan pada Tabel 1.



Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024

| No  | Sasaran Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Target      |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                             | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                                                                         | (4)         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         |
| 1   | Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 8 Juta Ha   | 10 Juta Ha  | 10 Juta Ha  | 10 Juta Ha  | 5 Juta Ha   |
| 2   | Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif                              | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya                                                              | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE |

Upaya pencapaian sasaran strategis serta pencapaian indikator kinerja kegiatan akan dilaksanakan melalui dua indikator kinerja kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat di lingkup Direktorat BPEE. Masing-masing indikator kinerja kegiatan memiliki komponen dan sub komponen yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial tahun 2020-2024 diuraikan dalam bentuk tabel di atas.

### C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Rencana kegiatan dan anggaran Direktorat BPEE disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 No. SP-DIPA-029.05.1.465011/2020. Untuk Tahun 2020, secara administrasi dan keuangan, Direktorat BPEE dan Unit Kerja Eselon Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE lainnya menjadi bagian dari Satuan Kerja (Satker) Kantor Pusat (KP) Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat BPEE memiliki pagu anggaran untuk tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.294.771.000,- (*sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alokasi pagu tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan teknis, operasional perkantoran, belanja modal serta dukungan manajemen. Rincian jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 terlampir pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2020

| No.   | Sumber Dana  | Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) |                |               | Jumlah         |
|-------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|       |              | Belanja Modal                       | Belanja Barang |               |                |
|       |              |                                     | Ops            | Non Ops       |                |
| 1     | Rupiah Murni | 336.265.000                         | 1.401.870.000  | 7.177.494.000 | 8.915.629.000  |
| 2     | PNBP         |                                     |                | 1.379.142.000 | 1.379.142.000  |
| 3     | HLN          | -                                   | -              | -             | -              |
| Total |              | 336.265.000                         | 1.401.870.000  | 8.556.636.000 | 10.294.771.000 |

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE per Output

| Kode         | Kegiatan                                                                                     | Pagu           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5424.003.001 | Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi | 2.772.994.000  |
| 5424.003.002 | Dokumen Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial                       | 4.621.657.000  |
| 5419.950.006 | Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Dukungan Manajemen)                          | 1.161.985.000  |
| 5419.951.006 | Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Sarana dan Prasarana)                        | 336.265.000    |
| 5419.994     | Layanan Perkantoran [Base Line]                                                              | 1.401.870.000  |
| Total        |                                                                                              | 10.294.771.000 |

Tabel 4. Lokasi Target IKK Direktorat BPEE TA 2020

| No. | IKK dan Target Kinerja                                                                                                      | Komponen                                                                                                              | Lokasi Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) | 1. Penyusunan NSPK<br>2. Verifikasi Identifikasi Dan Inventarisasi Potensi Kehati<br>3. Registrasi Ekosistem Esensial | 1. BKSDA Aceh<br>2. BBKSDA Sumatera Utara<br>3. BKSDA Sumatera Barat<br>4. BBKSDA Riau<br>5. BKSDA Jambi<br>6. BKSDA Sumatera Selatan<br>7. BKSDA Bengkulu -Lampung<br>8. BBKSDA Jawa Barat<br>9. BKSDA Jawa Tengah<br>10. BKSDA DIY<br>11. BBKSDA Jawa Timur<br>12. BKSDA Bali<br>13. BKSDA Kalimantan Barat<br>14. BKSDA Kalimantan Tengah<br>15. BKSDA Kalimantan Selatan<br>16. BKSDA Kalimantan Timur<br>17. BBKSDA Sulawesi Selatan<br>18. BKSDA Sulawesi Tenggara |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19. BKSDA Sulawesi Tengah<br>20. BKSDA Sulawesi Utara<br>21. BKSDA NTB<br>22. BKSDA NTT<br>23. BKSDA Maluku<br>24. BBKSDA Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) | 1. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati<br>2. Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT<br>3. Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem Esensial | 1. KEE Taman Kehati Kokolomboi, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah<br>2. KEE Taman Kehati Pelawan, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>3. KEE Mangrove Teluk Pangpang, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur<br>4. KEE Mangrove Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah<br>5. KEE Mangrove Lambu, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat<br>6. KEE Mangrove Ujung Pangkah, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur<br>7. KEE Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung<br>8. KEE Koridor Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat<br>9. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur<br>10. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Penyu Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat<br>11. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Desa Panjaratan, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan |

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE disampaikan pada tabel berikut dan pernyataan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam **Lampiran 1**.

| No  | Sasaran Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Target        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                                                                         | (4)           |
| 1   | Terselenggaranya Inventarisasi dan Verifikasi Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi | Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif di Luar Kawasan Konservasi | 8 Juta Hektar |
| 2   | Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang Efektif                              | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya                                                              | 11 Unit KEE   |

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2020

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2020

### A. Capaian Kinerja (IKK)

Pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat Efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana TK. Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat BPEE. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang perlu dicapai oleh Direktorat BPEE selama tahun anggaran 2020. Pencapaian kinerja sasaran strategis merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat BPEE tahun 2020. Terdapat satu sasaran kegiatan dan dua Indikator Kinerja Direktorat BPEE pada dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/*outcome* Direktorat BPEE tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun 2020 berdasarkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

| No  | Sasaran Program/Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                           | Target        | Realisasi         | %      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                                                                         | (4)           | (5)               | (6)    |
| 1   | Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 8 Juta Hektar | 6,663 Juta Hektar | 83,29  |
|     | Terselenggaranya pembinaan                                                                                  | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan                                                                                         | 11 Unit KEE   | 11 Unit KEE       | 100,00 |



| No                                         | Sasaran Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | %            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------|
|                                            | pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif | efektivitas pengelolaannya |        |           |              |
| Capaian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2020 |                                                     |                            |        |           | <b>91,65</b> |

Jumlah Anggaran Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2020 : Rp. 4.758.229.000,-  
Jumlah Sisa Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2020 : Rp. 330.853.973,-  
Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2020 : **Rp. 4.427.375.027,-**  
**(93,04%)**

**IKK 1 :**

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Capaian Tahun 2020

**83,29%**

**1**

Target Kinerja Kegiatan 2020 → Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi seluas **8 Juta Hektar**

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                           | Target IKK | Realisasi IKK | % Realisasi IKK | Anggaran pada IKK | Realisasi Anggaran pada IKK | % Realisasi Anggaran |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                         | (3)        | (4)           | (5)             | (6)               | (7)                         | (8)                  |
| 1   | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 8 Juta     | 6,663 Juta    | 83,29           | 1.567.087.000     | 1.522.134.609               | 97,13                |

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi merupakan bagian dari kegiatan Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi. Kegiatan tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif di Luar Kawasan Konservasi.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi adalah untuk memperoleh data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar Kawasan Konservasi yang terverifikasi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi adalah untuk menunjukan area-area di luar Kawasan Konservasi yang terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memberikan arahan pengelolaan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh kepada para pengelola di tingkat tapak.

Keluaran atau output dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di Luar Kawasan Konservasi.



Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi selama tahun 2020 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Tabel realisasi Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi

|                    | 2020          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Target (PK)</b> | 8 Juta Ha     | 10 Juta Ha | 10 Juta Ha | 10 Juta Ha | 5 Juta Ha |
| <b>Capaian</b>     | 6,663 Juta Ha | -          | -          | -          | -         |
| <b>Persentase</b>  | 83.29 %       | -          | -          | -          | -         |



Gambar 3. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKK 1

Jika diperinci per UPT maka akan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 9. Tabel Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Per UPT

| No | Unit Kerja            | Target Luasan (Ha) | Total Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BKSDA Aceh            | 333.203            | 708.389,70                                     | Mila; Cot Girek; Aceh Timur; DAS Peusangan; Sampoinet; Simbabala; Pulo Sarok; Landscape Barat; Kapaseusak                                                                                                                      |
| 2  | BBKSDA Sumatera Utara | 294.187            | 2.792,97                                       | Jaring Halus; Bagan Percut; Pantai Sujono; Pantai Kressek; Bukit Maradja Estate; PT PD Paya Pinang (Serdang Berdagai); Batang Toru; PT Cinta Raja (Deli Serdang); PT Sinar Pandawa (Labuhan Batu); North Estate (Labuhan Batu) |

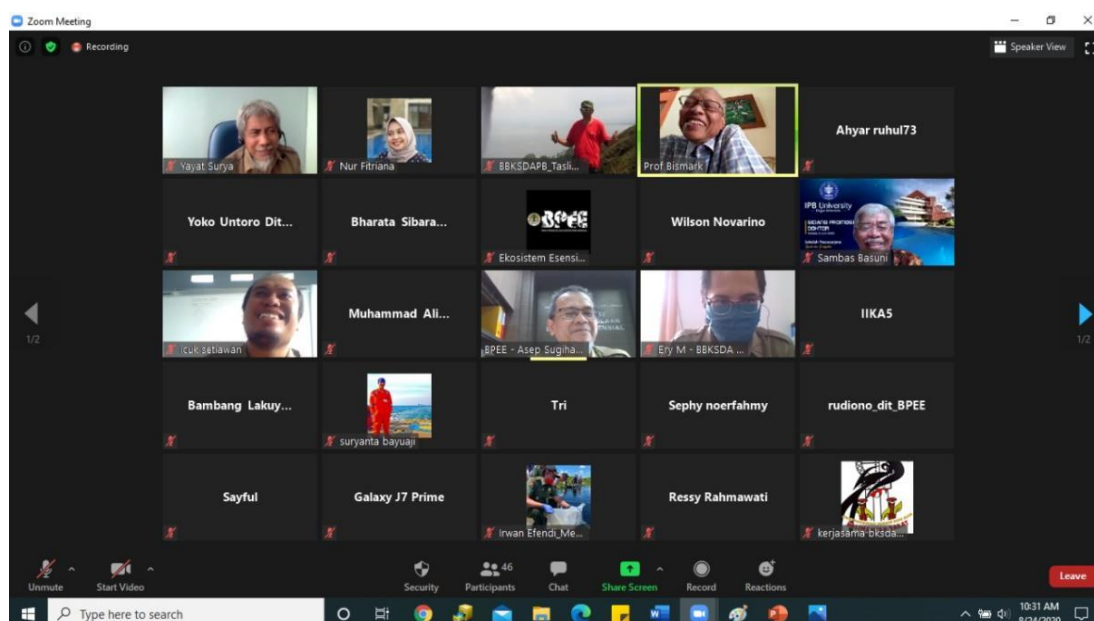
|    |                          |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | BKSDA Sumatera Barat     | 294.187 | 549.642,99                 | Kab. Agam; Kab. Agam; Kab. Solok; Kota Padang; Kab. Solok; Kab. Pasaman; Kab. Pasaman Barat                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | BBKSDA Riau              | 627.381 | 327.015,02                 | Kantong Tesso Tenggara; Kantong Serangge; Kantong Petapahan; Kantong Giam Siak Kecil; Kantong Balai Raja; Kantong Mahato; Kantong Tesso Utara; Kantong Tesso Tenggara Bag Selatan                                                                                                           |
| 5  | BKSDA Bengkulu-Lampung   | 294.187 | 583.940,38                 | KPHL Batu Tegi, KPHL Bukit Daun, KPHL Kaur, KPHP Bengkulu Utara, KPHP Muko Muko                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | BKSDA Sumatera Selatan   | 294.187 | 1.271.982,01               | Kantong Habitat Gajah Sugihan-Simpang Heran, Kantong Harimau-Gajah Dangku Meranti, Kantong Harimau Jambul Nanti Patah, Kantong Bukit Dingin                                                                                                                                                 |
| 7  | BKSDA Jambi              | 294.187 | 111.064,34                 | KEE Pantai Cemara, KEE Koridor Gajah Seblat, PT. REKI                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | BKSDA Kalimantan Selatan | 333.203 | 402,14                     | Desa Panjaratan; Desa Kuala Lupak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | BKSDA Kalimantan Tengah  | 333.203 | 652.669,10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | BKSDA Kalimantan Timur   | 549.356 | 546.557,58                 | Danau Mesangat dan Kenohan Suwi; Bentang alam Wahea - Kelay                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | BKSDA Kalimantan Barat   | 333.204 | 97.612,73                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | BBKSDA Jawa Barat        | 255.170 | 85.409,97                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | BKSDA Jawa Tengah        | 255.170 | 96.154,75                  | KEE Gunung Ungaran, KEE Petung Kriyono                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | BBKSDA Jawa Timur        | 255.170 | 281.901,53                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | BKSDA DIY                | 255.170 | 120.278,52                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | BKSDA Jakarta            | 0       | Tidak ada data shp polygon | Tidak ada data shp polygon                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | BBKSDA Sulawesi Selatan  | 333.204 | 297.628,03                 | Kab SidRencana Aksi Pelindungan, Kab Luwu Utara                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | BKSDA Sulawesi Tengah    | 333.204 | 239.782,98                 | Kab.Parigi Moutong, Kab.Tojo Una-Una, Kab.Poso, Kab.Banggai Kepulauan, Kab. Banggai                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | BKSDA Sulawesi Tenggara  | 333.204 | Tidak ada data shp polygon | Kabupaten Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | BKSDA Sulawesi Utara     | 333.204 | Tidak ada data shp polygon | Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Minahasa, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato                                                                                                                                                                                   |
| 21 | BKSDA Bali               | 333.204 | 65,66                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | BKSDA NTB                | 333.204 | 681.603,60                 | KPH Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Brang Rea, KPH Matayang, KPH Sejong, KPH Puncak Ngengas, KPH Batulante, KPH Orong Telu, KPH Brang Beh, KPH Ampang, KPH Ampang Riwo, KPH Plampang, KPH Ropang, KPH Madapangga Rompu, KPH Maria Donggomasa, KPH Tambora, KPH Soromandi |

|    |                    |                  |                     |                                                                                       |
|----|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | BBKSDA NTT         | 333.204          | 522,11              | Pulau Rote (KEE Rote Ndao), Pulau Flores (Tanjung Torong Padang, Riung), Pulau Longos |
| 24 | BKSDA Maluku       | 333.204          | 775,86              | Tanjung Maleo, KEE Mangrove Kao, Pulau Buano, Pantai Laisela, Pulau Lea               |
| 25 | BBKSDA Papua       | 333.203          | 6.300,00            | Timika (SKW II), Rawa Baki, Keakwa                                                    |
| 26 | BBKSDA Papua Barat | 0                | 800,00              |                                                                                       |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>8.000.000</b> | <b>6.663.291,96</b> |                                                                                       |

Kegiatan penunjang dalam pencapaian IKK ini terdiri dari kegiatan :

## 1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Tahapan awal dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi adalah penyusunan NSPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyusunan NSPK dilaksanakan dengan metode pertemuan dan diskusi, baik secara internal maupun bersama dengan para pihak yang berkompeten. Kegiatan ini dilaksanakan selama rentang waktu Januari - November 2020, secara daring dan tatap muka.



Gambar 4. Penyusunan NSPK Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar KSA, KPA dan TB

Penyusunan NSPK melibatkan pihak-pihak dan pakar/praktisi yang berkompeten di bidangnya. Para pihak yang terlibat diantaranya Dr. Wilson Novarino, M.Si (Universitas Andalas), Prof. Dr. Ir. H. Sambas Basuni (Institut Pertanian Bogor), Dr.rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc. (Universitas Gajah Mada), Prof. Riset. Dr. Ir. M. Bismark (Litbang KLHK), Muhammad Muslich (WCS), Erwin Willianto (Sintas), serta melibatkan Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Adapun NSPK yang telah disusun berupa Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan

Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. NSPK yang disusun mengatur tentang ketentuan, tata cara pengambilan serta analisa data.

## 2. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi untuk Balai Besar/Balai KSDA, sebagai pelaksana teknis kegiatan. Bimbingan teknis diberikan kepada Balai Besar/Balai KSDA sebagai upaya untuk memberikan pembekalan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi.

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan target peserta berasal dari staf/pegawai teknis lingkup Balai Besar/Balai KSDA. Bimbingan teknis telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu Agustus-Oktober 2020. Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara daring dan tatap muka. Bimbingan teknis pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan target staf/pegawai teknis lingkup Balai Besar/Balai KSDA region Jawa dan region Kalimantan. Selanjutnya, untuk region Sumatera, bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020. Sedangkan untuk region Sulawesi, region Bali-Nusra, dan region Maluku-Papua kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020.



Gambar 5. Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi Region Sumatera, Region Jawa, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Bali-Nusra, dan Region Maluku-Papua

Beberapa hal yang menjadi perhatian dan arahan dalam kegiatan-kegiatan bimbingan teknis tersebut diantaranya data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi ini tidak ditujukan untuk membentuk Kawasan

Ekosistem Esensial. Selain itu, Balai Besar/Balai KSDA harus melibatkan para pihak atau *stakeholder* yang berkepentingan saat melaksanakan kegiatan. Pelibatan para pihak menjadi penting karena data dan informasi kehati di suatu kawasan tidak selalu kosong, sehingga boleh jadi para pihak dan atau pemangku kawasan telah memiliki data dan informasi kehati di wilayah kerjanya.

### 3. Koordinasi Pelaksanaan

Direktorat BPEE telah melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi dalam rangka percepatan pencapaian target. Koordinasi dilaksanakan dengan metode pertemuan daring dan tatap muka, serta kunjungan ke Balai Besar/Balai KSDA. Hal ini dilakukan demi melanjutkan kelancaran kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi yang dilakukan oleh UPT.



Gambar 6. Koordinasi Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi

### 4. Verifikasi Hasil Kegiatan

Kegiatan verifikasi hasil inventarisasi merupakan tahapan dimana data dan informasi yang diperoleh oleh Balai Besar/Balai KSDA akan dikumpulkan dan diverifikasi, sesuai dengan ketentuan NSPK yang berlaku. Kegiatan verifikasi hasil inventarisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar KSA, KPA, dan TB. Selain itu, kegiatan ini juga mengidentifikasi area-area di luar KSA, KPA, dan TB yang terindikasi

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan mengidentifikasi lokasi dan luas area dalam rangka menyusun rancangan laporan akhir pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA, KPA dan TB.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 24 - 27 November 2020 bertempat di Hotel Salak Padjadjaran, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan/staf teknis dari 26 UPT Balai Besar/Balai KSDA, perwakilan dari Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE serta melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat mitra Ditjen KSDAE. Kegiatan dilaksanakan dengan format pleno dan *focused group discussions* (FGD) yang terbagi ke dalam 5 kelompok, yang mewakili 5 region, yaitu region Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusra Maluku Papua.



Gambar 7. Kegiatan Verifikasi hasil inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian IKK I hanya mencapai 83,29%. Banyak hal yang menyebabkan hal ini dapat terjadi seperti :

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterlambatan dimulainya kegiatan inventarisasi dan verifikasi potensi Kehati di luar KSA, KPA dan TB baik di pusat maupun di UPT, sehingga kegiatan baik di pusat maupun di UPT baru dimulai bulan Juli 2020.
2. Target area yang diinventarisasi dan diverifikasi relatif sangat luas yaitu 43 juta hektar sampai tahun 2024 dan 8 juta hektar di tahun 2020, namun dengan ketersediaan anggaran yang relatif minimal.
3. Kebijakan *refocusing*/revisi anggaran yang tidak dibarengi dengan revisi target.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengingat secara administratif area yang diinventarisasi bukan wilayah pengelolaan Ditjen KSDAE maka perlu dilakukan kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terutama Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat mitra KSDAE dan terutama pemilik/pengelolaan kawasan.
2. Mengoptimalkan kegiatan lain dalam memperoleh data dan informasi kehati di luar KSA, KPA dan TB seperti penanganan konflik satwa yang umumnya terjadi di luar KSA, KPA dan TB.
3. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPT dan para pihak baik secara tatap muka maupun daring agar pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan kehati tinggi dapat lebih dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan optimal di tingkat tapak.

**IKK 2 :**

Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

Capaian Tahun 2020 :

**100,00%****2**

Target Kinerja Kegiatan 2020 → Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif di 11 Unit KEE

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

| No. | Indikator                                                                      | Target      | Realisasi   | % Realisasi i IKK | Anggaran pada IKK | Realisasi Anggaran pada IKK | % Realisasi Anggaran |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)         | (4)         | (5)               | (6)               | (7)                         | (8)                  |
| 1   | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 100,00            | 3.191.142.000     | 2.905.240.418               | 91,04                |

Inisiasi perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) melalui skema KEE merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan kehati yang mampu meningkatkan kepedulian serta peran aktif masyarakat dan para pihak pada upaya perlindungan kehati, khususnya yang berada di luar Kawasan Konservasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka keberadaan KEE perlu diperkuat dengan pengelolaan yang efektif.

Ditjen KSDAE telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diantaranya yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE sebanyak 55 Unit KEE pada periode tahun 2020-2024. Hal ini selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat BPEE tahun 2020-2024, dimana salah satu sasaran kegiatannya adalah terselenggaranya pembinaan pengelolaan KEE yang efektif, dengan indikator jumlah KEE yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sebanyak 55 unit KEE dalam 5 tahun (11 unit KEE per tahun).

Kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE yang selanjutnya menjadi target IKK 2 Direktorat BPEE, dilaksanakan oleh Direktorat BPEE selaku pembina, dengan dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE, dalam hal ini UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam selaku pelaksana lapangan, serta melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait antara lain KLHK, Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, pihak swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Terdapat 11 (sebelas) unit KEE yang ditingkatkan efektivitasnya pada capaian kinerja tahun 2020, yaitu :

1. KEE Taman Kehati Kokolomboi, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah
2. KEE Taman Kehati Pelawan, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. KEE Mangrove Teluk Pangpang, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
4. KEE Mangrove Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
5. KEE Mangrove Lambu, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. KEE Mangrove Ujung Pangkah, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
7. KEE Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung



8. KEE Koridor Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
9. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
10. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Penyu Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi Desa Panjaratan, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka pencapaian 11 (sebelas) target IKK 2 di atas, pada Direktorat BPEE dilaksanakan melalui 2 (dua) komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah, Taman Kehati, dan Karst; serta Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar dan ABKT. Selanjutnya kedua komponen utama ini dijabarkan lagi pada masing-masing sub komponen kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah, Taman Kehati, dan Karst**

Kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KEE Lahan Basah, Taman Kehati dan Karst dilakukan melalui sub komponen kegiatan berikut :

##### **1. Penyiapan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

Direktorat BPEE selaku pembina dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) memiliki tugas dan fungsi dalam penyiapan NSPK yang dapat mendukung implementasi pengelolaan KEE bagi *stakeholder* terkait.

Dalam hal ini, selama TA 2020 telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Kehati, serta peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. Kedua NSPK tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengelolaan KEE sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan efektivitas pengelolaannya.



Gambar 8. Rapat Penyusunan NSPK Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE di Hotel Salak Bogor

##### **2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi terhadap Pengelolaan KEE**

Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan ekosistem esensial merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Direktorat BPEE dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman *stakeholder* dalam pengelolaan KEE

khususnya pada tipologi KEE Lahan Basah (Mangrove), Taman Kehati dan Karst. Tujuan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi adalah untuk mensosialisasikan NSPK maupun kebijakan dalam bidang ekosistem esensial sehingga diharapkan *stakeholder* yang melakukan kegiatan pengelolaan KEE dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan KEE. Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan ekosistem esensial dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, rapat pembahasan, dan perjalanan dinas ke berbagai lokasi di 3 (tiga) tipologi KEE (Mangrove, Karst dan Taman Kehati), yaitu Jakarta, Bogor, Sumedang, dan Kebumen.

Salah satu kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Direktorat BPEE adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2020 di Bandung Giri Gahana Resort, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Kehati kepada pengelola Taman Kehati (Dinas LH Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT KSDA, Akademisi serta masyarakat). Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan secara faktual dan virtual, dan keseluruhan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Peserta bimbingan teknis terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota lingkup Jawa Barat, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Pusat P3E Jawa, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Perusahaan/Swasta lingkup Jawa Barat. Kegiatan pelatihan meliputi pembukaan dan arahan dari Direktur BPEE; sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; paparan narasumber yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Praktisi Ekologi; diskusi; serta kunjungan lapang ke lokasi Taman Kehati Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.



Gambar 9. Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Kehati di Bandung Giri Gahana Resort

Beberapa rekomendasi dari kegiatan bimbingan teknis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/kota maupun instansi/pihak swasta untuk membangun Taman Kehati dalam rangka

pendaftaran sumberdaya alam hayati daerah (amanat UU 32 Tahun 2009), sebagai bentuk Kawasan Ekosistem Esensial, sehingga diharapkan pada tahun 2020-2024 terjadi pertumbuhan pembangunan Taman Kehati di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Kehati ini diharapkan Pemerintah Daerah ataupun pihak swasta yang ingin membangun atau mengembangkan Taman Kehati memiliki acuan yang jelas sehingga sesuai dengan konsep Taman Kehati yang seharusnya.



Gambar 10. Kunjungan Lapang ke Lokasi Taman Kehati Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat



Gambar 11. (a) Bimbingan Teknis Interpreter (Pemandu Wisata) Taman Kehati Hutan Pelawan Kab. Bangka Tengah; (b) Praktek Kepemanduan Wisata oleh Peserta yang Dipandu oleh Narasumber di Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan, Bangka Tengah



Gambar 12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat di KEE Mangrove Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

### 3. Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati

Kegiatan koordinasi pengelolaan ekosistem esensial Lahan Basah dan Taman Kehati merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Direktorat BPEE dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pengelolaan KEE khususnya pada tipologi KEE Lahan Basah (Mangrove), Taman Kehati dan Karst. Tujuan kegiatan koordinasi adalah untuk membangun kesepahaman dalam pengelolaan KEE serta sinkronisasi kegiatan antar Direktorat BPEE selaku pembina, UPT Ditjen KSDAE (Balai Besar KSDA/ Balai KSDA) selaku koordinator pembinaan KEE di tingkat tapak, dan Pemerintah Daerah/ swasta/ masyarakat selaku pengelola KEE di daerah.

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, rapat pembahasan, dan perjalanan dinas ke berbagai lokasi di 3 (tiga) tipologi KEE (Mangrove, Karst dan Taman Kehati), yaitu Jakarta, Pulau Rambut, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Semarang, Indramayu, Palembang, Pekanbaru, Gorontalo, Lombok, dan Bontang.



Gambar 13. Salah Satu Bentuk Kegiatan Koordinasi dalam rangka Pembahasan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Teluk Pangpang di Hotel Aston, Surabaya

### 3. Monitoring dan Evaluasi Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati

Kegiatan monitoring dan evaluasi ekosistem esensial juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Direktorat BPEE. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi terhadap pengelolaan KEE yang telah dilakukan oleh forum/ pengelola KEE, sekaligus memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas ke berbagai lokasi di 3 (tiga) tipologi KEE (Mangrove, Karst dan Taman Kehati), yaitu Bogor, Bandung, Indramayu, Ciamis, Cirebon, Yogyakarta, Kebumen, Wonogiri, Trenggalek, Gresik, Banyuwangi, Lampung, Belitung, Bima, dan Palangkaraya.



Gambar 14. Kegiatan Monitoring Taman Kehati Kebon Pelok, Cirebon

#### 4. Koordinasi Dukungan Kerjasama/ Komitmen Internasional terkait Lahan Basah dan Taman Kehati

Kegiatan koordinasi dukungan kerjasama/ komitmen internasional terkait Lahan Basah dan Taman Kehati bertujuan untuk melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Direktorat BPEE terhadap seluruh komitmen internasional yang terkait dengan pengelolaan Lahan Basah dan Taman Kehati, khususnya terkait Konvensi Ramsar dan komitmen internasional terkait lainnya (CBD, SDGs, UNFCCC, dan lain-lain). Dalam Konvensi Ramsar, Direktur BPEE bertindak sebagai *National Focal Point* Konvensi Ramsar di Indonesia yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan lahan basah dengan mengimplementasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil konvensi. Selanjutnya, Direktorat BPEE memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil pengelolaan lahan basah sesuai implementasi Konvensi Ramsar dalam bentuk *National Report* yang berisikan implementasi pengelolaan lahan basah di Indonesia termasuk di wilayah KEE.



Gambar 15. Koordinasi Pengusulan Kota Surabaya sebagai Nominasi *Wetland City Accreditation*



Gambar 16. Kegiatan koordinasi terkait Konvensi Ramsar di Situs Ramsar Suaka Margasatwa Pulau Rambut

Kegiatan koordinasi dukungan kerjasama/ komitmen internasional terkait lahan basah dan taman kehati dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun baik itu pelaksanaan di level nasional maupun internasional.

Di level nasional dilakukan dengan koordinasi pihak-pihak terkait seperti eselon I teknis terkait lingkup KemenLHK, Kementerian Luar Negeri, pengelola *Ramsar Site* (UPT Ditjen KSDAE), pengelola KEE, dan Yayasan Lahan Basah (CEPA pada Konvensi Ramsar). Sedangkan di level internasional komunikasi dilaksanakan dengan Sekretariat Konvensi Ramsar dan Ramsar Regional Center-East Asia.



Gambar 17. Koordinasi terkait International *Coral Reef Initiative* di Pulau Kelapa, TN Kepulauan Seribu

Kegiatan koordinasi dukungan kerjasama/komitmen internasional terkait lahan basah dan taman kehati dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, rapat pembahasan, dan perjalanan dinas ke berbagai lokasi lahan basah yaitu Jakarta

(Kepulauan Seribu, Pulau Rambut), Bogor, Kebumen, Jambi, Surabaya, dan Karimun Jawa.



Gambar 18. Penangkaran Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Pulau Kelapa, TN Kepulauan Seribu

## 5. Penyusunan Dokumen Situs Ramsar Baru

Sub komponen ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Situs Ramsar Baru. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola lahan basah dan stakeholder terkait mengenai Konvensi Ramsar, kriteria Situs Ramsar, tahapan pengusulan kawasan lahan basah sebagai Situs Ramsar, dan tatacara kompilasi *Ramsar Sheet Information System* (RSIS). Melalui pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman *stakeholder* serta munculnya inisiasi *stakeholder* untuk pengusulan Calon Situs Ramsar Baru.

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2020 di The Patra Bali Resort & Villas, Denpasar, Bali. Pelatihan dilaksanakan secara faktual dan virtual, dan keseluruhan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Peserta bimtek yang hadir sebanyak 45 peserta *offline* dan ± 100 peserta *online*, yang terdiri dari UPT Ditjen KSDAE Situs Ramsar dan Calon Situs Ramsar, UPT Ditjen KSDAE selaku Pembina KEE, Pemerintah Daerah dan Akademisi. Kegiatan pelatihan meliputi paparan terkait Konvensi Ramsar, kriteria pengusulan Situs Ramsar, tahapan pengusulan Situs Ramsar dan pengisian RSIS oleh Direktorat BPEE dan Yayasan Lahan Basah; *lesson learn* oleh UPT pengelola Situs Ramsar; RAWES oleh FMIPA Universitas Udayana; serta kunjungan lapang ke lokasi lahan basah Provinsi Bali, Tahura Ngurah Rai dan Lagoon ITDC. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.



Gambar 19. Pelatihan Penyusunan Dokumen Situs Ramsar Baru di The Patra Bali Resort & Villas, Denpasar, Bali

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. UPT Pengelola Situs Ramsar dan Calon Situs Ramsar perlu selalu melakukan pemutakhiran data kawasan lahan basah pada sistem RSIS, serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan monitoring keanekaragaman hayati dalam rangka untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data dimaksud.
- b. Dukungan penganggaran atau kegiatan untuk monitoring keanekaragaman hayati pada Situs Ramsar dapat dilakukan melalui mekanisme Kerjasama dengan mitra LSM, serta mendorong peran aktif pengelola Situs Ramsar dalam mengajukan proposal pendanaan hibah SGF dari Sekretariat Ramsar.
- c. Perlu dibuat standarisasi terkait pengelolaan Situs Ramsar yang dapat menjadi acuan bagi pengelola Situs Ramsar di daerah baik standar monitoring, standar SDM, standar anggaran dan lain-lain.
- d. Direktorat BPEE akan terus memantau dan melakukan pembinaan terhadap pengusulan Calon Situs Ramsar baik yang sudah ada pada sistem RSIS (TN Sebangau dan TWA Menipo) serta beberapa kawasan yang akan diusulkan yaitu :
  - 1) KEE Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
  - 2) KPA Rawa Kandis (BKSDA Bengkulu-Lampung) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Terkait status KPA Rawa Kandis, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap hasil evaluasi fungsi KPA Rawa Kandis sebelum diusulkan sebagai Situs Ramsar;
  - 3) KEE Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
  - 4) KEE Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; dan
  - 5) KEE Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 20. Kunjungan Lapang ke Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai dan Lagoon ITDC, Denpasar, Bali

## **B. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar dan ABKT**

Kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KEE Koridor dan ABKT dilaksanakan melalui sub komponen kegiatan berikut :

### **1. Penyiapan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

Pada tahun 2020, Direktorat BPEE selaku pembina pengelolaan KEE menyusun 2 (dua) NSPK yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE Koridor dan ABKT, yaitu :

- a. Reviu Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.5/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.12/KSDAE/BPE2/KSA.4/12/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan pengelola KEE dan para pihak untuk melakukan pengelolaan KEE secara efektif dan menentukan tindak lanjut upaya peningkatan efektivitas pengelolaan KEE.

Rapat penyusunan/reviu petunjuk teknis secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas untuk mencegah penularan Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan, oleh karena itu Direktorat BPEE memfasilitasi pertemuan secara online bagi Pakar dan Narasumber.



Gambar 21. Rapat Penyusunan NSPK secara daring dan tatap muka di Salak The Heritage Hotel, Bogor

## 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE

Dalam rangka memperkuat strategi implementasi pengelolaan KEE, Direktorat BPEE melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap staf/pegawai teknis UPT BKSDA di seluruh Indonesia selaku pelaksana teknis pengelola KEE. Penyelenggaraan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf/pegawai teknis lingkup Balai Besar/Balai KSDA sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan KEE.

Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE dilaksanakan antara lain di Bandung, Lampung, Palembang dan Sulawesi Selatan. Tujuan dari penyelenggaraan bimtek ini adalah untuk :

1. Menyamakan pemahaman mengenai pengukuran efektivitas pengelolaan KEE dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KEE, dan
2. Memperoleh masukan dan saran dari UPT dalam rangka pencapaian IKK peningkatan efektivitas pengelolaan KEE.

Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE dilaksanakan secara virtual dan faktual dengan menerapkan protokol kesehatan.



Gambar 22. Bimtek Peningkatan Efektivitas secara daring dan tatap muka di Bandung, Jawa Barat tanggal 22-24 Juli 2020



Gambar 23. Bimtek Peningkatan Efektivitas secara daring dan tatap muka di Salak Pajajaran Hotel, Bogor

### 3. Koordinasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor dan ABKT

Kegiatan koordinasi pengelolaan KEE bertujuan untuk menciptakan pengelolaan KEE yang efektif melalui sinkronisasi, penyerasian, dan kolaborasi berbagai pihak secara berkesinambungan. Sasarannya adalah terciptanya kesepahaman peningkatan efektivitas pengelolaan Koridor Hidupan Liar dan ABKT untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses dan upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Koridor Hidupan Liar dan Areal ABKT.

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat dan pertemuan dengan pihak terkait pengelola KEE Koridor dan ABKT, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Lombok dan daerah lainnya. Dalam upaya penyelenggaraan bimtek dapat dihadiri oleh seluruh UPT BBKSDA/BKSDA maka bimtek dilaksanakan per region:

- BBKSDA/BKSDA region Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dilaksanakan di Lombok pada tanggal 10 September 2020.
- BBKSDA/BKSDA region Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Oktober 2020.



Gambar 24. Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas di Lombok pada tanggal 10 September 2020 dengan peserta dari UPT BBKSDA/BKSDA region Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua



Gambar 25. Rencana Aksi Pelindunganat Koordinasi lingkup BBKSDA/BKSDA region Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Oktober 2020

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Ekosistem Esensial Koridor dan ABKT

Direktorat BPEE melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi KEE Koridor dan ABKT yang merupakan rangkaian kegiatan pengendalian terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Teknis BBKSDA/BKSDA. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai capaian progres pelaksanaan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menilai capaian atau progres pelaksanaan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan koridor dan ABKT;
2. Mengidentifikasi permasalahan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan koridor dan ABKT; dan
3. Memberikan saran perbaikan atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan koridor dan ABKT.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk rapat dan kunjungan lapangan di Bogor, Bandung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.



Gambar 26. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Kalimantan Tengah

Sementara itu, pada tingkat tapak, UPT KSDA memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bidang konservasi ekosistem esensial khususnya peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem esensial sesuai dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disusun. Kegiatan-kegiatan pada UPT KSDA dapat berupa, penyusunan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan (RAP) KEE, implementasi RAP, implementasi pengembangan/ pemanfaatan potensi kawasan, peningkatan kapasitas dan usaha ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Lokasi 11 KEE dan jenis kegiatan terperinci dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 11.

Tabel 11. Data Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE di 11 Lokasi

| No | Kawasan Ekosistem Esensial                                                        | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Peran UPT                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Taman Kehati Kokolomboi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah             | 1. Sosialisasi perlindungan dan pemanfaatan TK Kokolomboi<br>2. Pelatihan identifikasi dan inventarisasi flora fauna di TK Kokolomboi                                                                  | KSDA Sulawesi Tengah bertindak sebagai penyelenggara sekaligus Narasumber dalam kegiatan tersebut                                                                                                                                                      | 1. Perlu koordinasi dengan stakeholder dan penguatan pelaksanaan pengelolaan TK Kokolomboi<br>2. Penyusunan Desain Dasar TK Kokolomboi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Taman Kehati Pelawan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1. Koordinasi pengelolaan TK Hutan Pelawan Kabupaten Bangka Tengah<br>2. Bimbingan Teknis Interpreter (Pemandu Wisata) Taman Kehati Hutan Pelawan Kab. Bangka Tengah                                   | KSDA Sumatera Selatan sebagai pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan DLH Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Desa Namang dan Pengelola Hutan Pelawan, serta sebagai narasumber pada kegiatan Bimtek Interpreter di Taman Kehati Hutan Pelawan | 1. Sosialisasi nilai penting hutan Pelawan<br>2. Perlu koordinasi dengan stakeholder dan penguatan pelaksanaan pengelolaan TK Hutan Pelawan<br>3. Bimtek lanjutan dengan jenis yang berbeda agar tercapai pemandu wisata yang handal<br>4. Pencanaan pengelolaan disusun secara sistematis dan terukur agar dapat mencapai visi misi yang dicanangkan<br>5. Pelibatan multipihak dalam pengelolaan secara mutual dan terukur agar Taman Kehati Hutan Pelawan dapat memberikan kontribusi baik secara lokal maupun global. |
| 3. | Mangrove Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur                         | 1. Koordinasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial<br>2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat<br>3. Konsultasi Publik Rencana Aksi<br>4. Monitoring kehati KEE<br>5. Bantuan ekonomi produktif | SKW V Banyuwangi BBKSDA Jawa Timur sebagai Pelaksana kegiatan.                                                                                                                                                                                         | 1. Kegiatan monitoring perlu rutin dilaksanakan setiap tahun<br>2. Bantuan ekonomi produktif yang diberikan kepada pengelola KEE perlu dimonitor agar bantuan tersebut bermanfaat sesuai peruntukannya.<br>3. Implementasi rencana aksi yang telah disusun dan disahkan oleh seluruh pengelola yang terlibat                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Mangrove Kabupaten                                                                | 1. Koordinasi pengelolaan Kawasan                                                                                                                                                                      | BKSDA Jawa Tengah sebagai pelaksana                                                                                                                                                                                                                    | 1. Implementasi rencana aksi yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

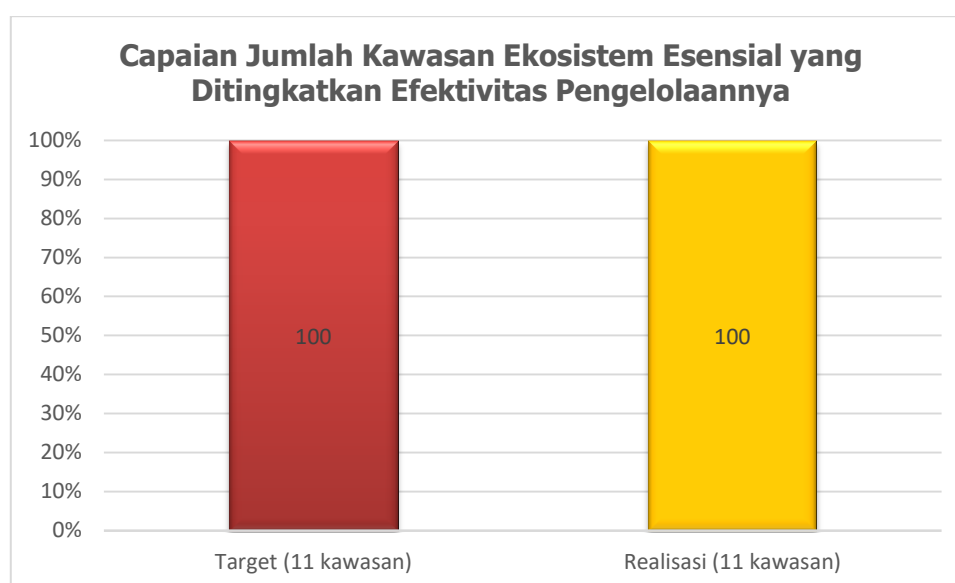
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kebumen, Jawa Tengah                                 | Ekosistem Esensial<br>2. Penyusunan Rencana Aksi<br>3. Monitoring kehati KEE                                                                                                                                                         | kegiatan                                                       | telah disusun<br>2. Penyusunan model pengelolaan dalam rangka mitigasi konflik vertikal dan horizontal khususnya untuk kegiatan pemanfaatan                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Mangrove Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat  | 1. Koordinasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial<br>2. Penyusunan Rencana Aksi KEE<br>3. Pembuatan Media Promosi<br>4. Monitoring kehati KEE<br>5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola KEE<br>6. Bantuan ekonomi produktif | BKSDA NTB dan SKW III Bima BKSDA NTB selaku pelaksana kegiatan | 1. Kegiatan monitoring perlu rutin dilaksanakan setiap tahun<br>2. Bantuan ekonomi produktif yang diberikan kepada pengelola KEE perlu dimonitor agar bantuan tersebut bermanfaat sesuai peruntukannya.<br>3. Implementasi rencana aksi yang telah disusun dan disahkan oleh seluruh pengelola yang terlibat<br>4. Desain untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Esensial |
| 6. | Mangrove Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1. Koordinasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial<br>2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat<br>3. Konsultasi Publik Rencana Aksi<br>4. Monitoring kehati KEE<br>5. Bantuan ekonomi produktif                               | SKW III Surabaya BBKSDA Jawa Timur sebagai Pelaksana kegiatan. | 1. Kegiatan monitoring perlu rutin dilaksanakan setiap tahun<br>2. Bantuan ekonomi produktif yang diberikan kepada pengelola KEE perlu dimonitor agar bantuan tersebut bermanfaat sesuai peruntukannya.<br>3. Implementasi rencana aksi yang telah disusun dan disahkan oleh seluruh pengelola yang terlibat                                                                    |
| 7. | Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Lampung            | 1. Koordinasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial<br>2. Pembentukan kelompok pengelola KEE<br>3. Bantuan ekonomi produktif<br>4. Papan informasi                                                                                  | SKW III Lampung BKSDA Bengkulu sebagai pelaksana               | 1. Bantuan ekonomi produktif yang diberikan kepada pengelola KEE perlu dimonitor agar bantuan tersebut bermanfaat sesuai peruntukannya<br>2. Pendampingan kelompok masyarakat yang telah dibentuk                                                                                                                                                                               |
| 8. | Koridor Kabupaten                                    | 1. Koordinasi                                                                                                                                                                                                                        | Finalisasi Penyusunan                                          | 1. Menetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat                                                       | <p>pengelolaann KEE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>                                                           | Renaksi (belum di ttd Gubernur Kalbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>pengelola KEE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun Rencana Aksi Perlindungan KEE di Kab.Kayong Utara</li> <li>3. Menyusun Rencana Kegiatan Perlindungan KEE</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan Pemda Kabupaten Kayong Uatara terkait revisi penetapan KEE di Kayong Utara</li> <li>5. Melaksanakan FGD atau sosialisasi Rencana Aksi Perlindungan KEE Kab.Ketapang di Kab.Ketapang</li> </ol> |
| 9.  | Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaann KEE</li> <li>2. Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>                                           | Finalisasi Penyusunan Renaksi Perlindungan dan Konservasi KEE Lahan Basah Mesangat-Suwi 2019-2023                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SK Penetapan</li> <li>2. Penerbitan SK Pengelola</li> <li>3. Penyusunan Rencana Kegiatan Perlindungan KEE</li> <li>4. Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | ABKT Penyu, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaann KEE</li> <li>2. Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan (patrol pantai dan petroli pasar)</li> <li>2. Penguatan SDM (pendampingan rutin, sosialisasi, pelatihan)</li> <li>3. Pembinaan Habitat (pelepasliaran penyu)</li> <li>4. Pengembangan ekowisata (wisata edukasi penyu untuk siswa sekolah, adopsi sarang, paket voluntary trip, dll)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pengelola KEE</li> <li>2. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Perlindungan KEE</li> <li>3. Menyusun Rencana Kegiatan Perlindungan KEE</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | ABKT Desa Panjaratan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam rangka penyusunan draft awal Renaksi Pelindungan KEE</li> <li>2. Bimtek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan inventarisasi potensi wisata dan fauna bekantan</li> <li>2. Koordinasi pengelolaan KEE</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SK PEnetapan KEE</li> <li>2. Penyusunan RENCANA AKSI PELINDUNGAN</li> <li>3. Penyusunan RKP</li> <li>4. Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |

Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya selama tahun 2020 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Tabel Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

|                    | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Target (PK)</b> | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE |
| <b>Capaian</b>     | 11 Unit KEE | -           | -           | -           | -           |
| <b>Persentase</b>  | 100%        | -           | -           | -           | -           |



Gambar 27. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2

Upaya peningkatan Efektivitas pengelolaan pada KEE Lahan Basah, Taman Kehati dan Karst pada tahun 2020 dapat terlaksana di setiap lokasi yang ditargetkan sebagaimana pada Renja Direktorat BPEE 2020 dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19. Intervensi kegiatan pada lokasi KEE dilaksanakan selain menggunakan anggaran APBN pada Direktorat BPEE dan UPT KSDA, juga dilaksanakan dengan dukungan kegiatan Pemerintah Daerah, dan para pihak lainnya. Bentuk intervensi kegiatan pada KEE Lahan Basah dan Taman Kehati sebagaimana tercantum pada Tabel 11 diatas.

Disamping itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Rehabilitasi Mangrove juga dilaksanakan pada beberapa KEE mangrove. Hal ini tentu saja mendukung upaya peningkatan efektivitas pengelolaan KEE, mengingat program ini dapat menjadi stimulus perekonomian masyarakat pesisir sekaligus upaya pemulihan ekosistem mangrove.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial tahun 2020 untuk 2 (dua) kegiatan pokok Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial sebesar Rp4.758.229.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.427.375.027,- atau 93,04%. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan *output* disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020

| No           | Kode | Output                                                                                                                                      | Pagu Anggaran        | Realisasi sampai dengan 31 Des 2020 | %            |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1            | 001  | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 1.567.087.000        | 1.522.134.609                       | 97,13        |
| 2            | 002  | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya                                                              | 3.191.142.000        | 2.905.240.418                       | 91,04        |
| <b>Total</b> |      |                                                                                                                                             | <b>4.758.229.000</b> | <b>4.427.375.027</b>                | <b>93,04</b> |

Berdasarkan data penyerapan anggaran sebesar **93,04%** dan capaian kinerja sebesar **91,65%** sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPEE tahun 2020 berjalan **efisien**.

Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memprioritaskan capaian kinerja pada target-target lokasi yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan anggaran seminimal mungkin (efisiensi anggaran) atau yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dukungan anggaran dan SDM dari Pemda, UPT KSDA atau mitra.

Pencapaian kinerja Direktorat BPEE pada tahun 2020 diharapkan menghasilkan beberapa *outcome* yang bermanfaat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi.
2. Meningkatnya ruang perlindungan kehati berdasarkan basis data yang teregistrasi sebagai kawasan yang bernilai kehati tinggi.
3. Terwujudnya pelestarian kehati melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pemanfaatan KEE.
4. Meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar KEE melalui program pemberdayaan masyarakat.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2020 merupakan laporan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2020, disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPEE tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPEE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah (1) Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi, dan (2) Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif. Sasaran tersebut dicapai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kegiatan yaitu (1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi dan (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya.

Nilai Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BPEE pada tahun 2020 sebesar **91,65%**. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi belum optimal dikarenakan Pandemi Covid-19 menyebabkan keterlambatan dimulainya kegiatan inventarisasi dan verifikasi potensi Kehati di luar KSA, KPA dan TB baik di pusat maupun di UPT, sehingga kegiatan baik di pusat maupun di UPT baru dimulai bulan Juli 2020. Sehingga untuk tahun selanjutnya perlu disusun strategi rencana pelaksanaan kegiatan agar mencapai target optimal.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN KINERJA**  
**DIREKTORAT BPPE**  
**2020**

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2020

Direktur,



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.

NIP. 19640229 199003 1 001

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Pertama,

Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.  
NIP. 19640229 199003 1 001

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial  
Tahun Anggaran : 2020

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                  | OUTPUT                                                           | TARGET        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 5424.003<br>Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial | 8 Juta Hektar |
| 2.  | Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif                              | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya                                                              | 5424.003<br>Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial | 11 Unit KEE   |

Kegiatan :

(5424) Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Anggaran :

Rp.4.758.229.000

Direktur Jenderal,



Ir. Wiratno, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Desember 2020  
Direktur



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.  
NIP. 19640229 199003 1 001

**RENCANA AKSI**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial  
Tahun Anggaran : 2020

| No. | Sasaran                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                           | Target B03                                                                                                                                                                                            | Target B06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target B09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target B12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | Pengumpulan dan pemilahan data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi                                                                                                        | Validasi (Ground Check) dan Verifikasi data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Validasi (Ground Check) dan Verifikasi data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tersedianya data dan informasi kawasan yang telah diverifikasi menjadi wilayah konservasi nasional                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif                              | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya                                                              | 1) Fasilitasi Pembentukan Pengelola KEE<br>2) Fasilitasi Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE<br>3) Inventarisasi Sosekbud di KEE<br>4) Pemetaan Potensi Ekonomi Produktif Masyarakat di KEE | 1) Fasilitasi Pembentukan Pengelola KEE<br>2) Fasilitasi Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE<br>3) Inventarisasi Sosekbud di KEE<br>4) Pemetaan Potensi Ekonomi Produktif Masyarakat di KEE<br>5) Fasilitasi/ pendampingan dalam usaha ekonomi produktif<br>6) Fasilitasi Pembentukan / Pembinaan Kelompok Pengelola KEE<br>7) Pembinaan pengembangan kapasitas pengelola KEE/ masyarakat | 1) Fasilitasi Pembentukan Pengelola KEE<br>2) Fasilitasi Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE<br>3) Fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KEE<br>4) Masterplan pengembangan ekonomi produktif Kawasan Ekosistem Esensial<br>5) Fasilitasi Pembentukan / Pembinaan Kelompok Pengelola KEE<br>6) Pembinaan pengembangan kapasitas pengelola KEE/ masyarakat | 1) Fasilitasi Pembentukan Pengelola KEE<br>2) Fasilitasi Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE<br>3) Fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KEE<br>4) Fasilitasi penyusunan Desain Dasar Taman Kehati<br>5) Pengusulan Situs Ramsar<br>6) Bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat pengelola KEE |

Jakarta, Desember 2020

Direktur,



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.  
NIP. 19640229 199003 1 001



**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2020**